

Ekonomi Pancasila dan Koperasi

Judul buku	: Ekonomi Pancasila dan Koperasi
Nama Penulis	: Maryanti
Penerbit dan Tahun Terbit	: Rajawali Press - Depok / 2022
Jumlah halaman	: 149
ISBN	: 978-623-372-726-6
Harga	: Rp.90.000,-
Cover buku	: (Terlampir)

Buku berukuran 25 X 15 cm ini diawali dengan gagasan penulis yang melihat adanya fenomena bahwa sistem ekonomi Pancasila harus dimasukkan kedalam kurikulum pengajaran ekonomi agar moral ekonomi “barat” tidak diterima begitu saja. Nilai-nilai keindonesiaan harus diintegrasikan kedalam silabus dan ruang-ruang kelas. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang diatur secara konstitusi yang diubah dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dari sanalah titik tolak kemerdekaan Indonesia yang menolak liberalisme dan kapitalisme. Perekonomian seyogianya disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri secara liberal sesuai kehendak pasar. Ekonomi Indonesia harus berdasarkan perencanaan dengan mekanisme *market driven* yang diselenggarakan melalui perencanaan ekonomi negara.

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan idiil perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi : (1) *Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Berdasarkan keempat ayat tersebut diatas terkandung makna sebagai berikut : (1) Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong royong) dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di Tanah Air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat (4) Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi Pancasila (5) Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (6) Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia terbagi beberapa periode yang dimulai dari Periode Pra Kemerdekaan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pra kemerdekaan yang diawali dengan masa pra kolonialisme, sistem perekonomian masih dalam bentuk feodal. Kegiatan utama ekonomi berkaitan dengan pertanian, eksplorasi alam dan perdagangan besar antar pulau. Periode kolonialisme yang dimulai (1602-1795) ditandai dengan masuknya VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang diberi hak oktrooi diantaranya hak mencetak uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri dan hak membuat perjanjian dengan raja-raja. Namun pada akhirnya VOC bangkrut. Kekuasaan VOC diambil alih oleh Republik Bataaf (Bataafsche Republiek) yang merupakan sekutu Republik Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte (1795-1811). Republik ini dihadapkan oleh sistem keuangan yang kacau balau. Selanjutnya berlangsung pendudukan Inggris (1811-1816). Inggris menerapkan teori Adam Smith yang kapitalistik. Kekuasaan selanjutnya berpindah kembali kepada Belanda (1816-1942). Belanda menerapkan sistem *culturstelsel* yang mana sistem ini merupakan pengganti *landrent* dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Pada periode kemerdekaan Republik Indonesia, periodisasi perekonomian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu (1) Periode Kemerdekaan yakni (a) periode orde lama (1945-1966) yang mana keadaan

ekonomi saat itu sangat buruk yang ditandai inflasi yang tinggi dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan (b) masa demokrasi liberal (1950-1957). Dalam mengatasi masalah ekonomi dilakukan Gunting Syarifuddin yaitu pemotongan nilai uang pada 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Program Benteng yaitu untuk meningkatkan jumlah wirausahawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bersaing dengan importir asing. Nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-undang No.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pembatalan sepihak hasil-hasil Konferensi Meja Bundar termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya (2) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967). Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp.1. Periode berikutnya adalah (3) Masa Orde Baru yang berlangsung 1966-1998. Perkembangan ekonomi masa orde baru lebih baik dari orde lama disebabkan beberapa faktor : kemauan yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi, stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada orde lama, sumberdaya manusia lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi barat dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Berakhirnya era orde baru maka muncullah (3) masa orde reformasi. Masa reformasi berlangsung (1998-2014) yang dimulai dari pemerintahan Presiden BJ.Habibie. Pemerintahan ini melakukan perbaikan ekonomi yang ditinggalkan orde baru dimana nilai tukar dollar terlampaui tinggi dibandingkan dengan rupiah. Paska Habibie dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid. Rezim ini berusaha memulihkan ekonomi yang belum stabil dan warisan orde baru. Sayangnya presiden juga terlibat kasus Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya dihadapan masyarakat. Kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Megawati Soekarnoputri. Kebijakan yang dilakukan adalah penundaan pembayaran utang negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Paska Megawati, kepemimpinan dilanjutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakannya yang kontroversial yakni mengurangi subsidi BBM dan pemberian BLT kepada masyarakat miskin. Kebijakan lain adalah memberikan kemudahan kepada investor asing. Dengan meningkatnya investor asing maka meningkatlah kesempatan kerja di masyarakat.

Ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran perorangan. Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya tidak cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis Indonesia. Mengakui kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 maka secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia yang lebih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi Pancasila.

Ekonomi rakyat adalah suatu usaha yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat. Menurut ahli ekonomi kerakyatan di Indonesia yaitu Prof.Mubyarto dari UGM dan Adi Sasono, Mantan Menteri UMKM jaman Habibie disepakati istilah *el nomi* kerakyatan berarti upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk sekelompok masyarakat banyak (rakyat). Terjemahan bebas mengenai ekonom kerakyatan di Indonesia ini adalah kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha yang sederhana. Manajemen usaha yang belum bersistem dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi landasan hukum untuk ekonomi kerakyatan ini ada pada Program Pembangunan Nasional (Propenas) UU No.25 Tahun 2000.

Koperasi secara umum merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan sama dan dihimpun dalam satu organisasi dengan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota didalamnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka manajemen koperasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan ilmu manajemen dalam ruang lingkup koperasi yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penngorganisasian, perencanaan dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi.

Sebagai Badan Usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha maka koperasi sebagai badan usaha berarti juga merupakan kombinasi dari manusia, aset fisik dan non fisik, informasi dan teknologi. Status anggota koperasi sebagai Badan Usaha adalah sebagai pemilik dan sebagai pemakai. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

Tuntutan budaya strategis dalam pembangunan karakter bangsa mendorong paradoks renungan dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengusur orang miskin bukan mengusur kemiskinan. Rakyat tidak dibawa serta dalam kemajuan pembangunan. Bahkan setiap detik terjadi transfer kepemilikan dari si lemah dan kecil kepada si kuat dan besar maka terjadilah yang namanya minderisasi dan aboriginisasi terhadap rakyat. Dengan demikian pembangunan mengusur orang miskin bukan mengusur kemiskinan.

Realitas lain adalah kedaulatan pasar dibiarkan berkuasa untuk mengusur kedaulatan rakyat. Globalisasi hanya berdasarkan kepada ekonomi dengan fundamental pasar. Sungguh di sayangkan kelas perkuliahan justru mengajarkan dan mendoktrin ilmu ekonomi berdasarkan fundamental ini. Kedaulatan pasar membentuk marginalisasi pada rakyat. Bukan seharusnya kita menjadi tuan di negeri sendiri, menjadi the master in our own homeland, not just to become host, yang terjadi hanya menjadi pelayan kepentingan global dan mancanegara. Lalu mengapa kita tetap menjadi koeli di negeri sendiri, mengapa kita hanya sekadar menjadi master of ceremony? Mengapa kesejahteraan rakyat tidak kunjung tercapai, kesenjangan antara kaya dan miskin sangat tajam? Ketidakadilan pendapatan dan kepemilikan semakin melebar.

Globalisasi ekonomi dengan pasar bebas dengan persaingan dan perdagangan bebas bawaannya makin mempertajam kesenjangan ini. Di sini rasa keadilan terusik, emansipasi dan toleransi terganggu, kerukunan nasional akan berubah menjadi konflik nasional yang akan menggoyahkan kestabilan integrasi nasional. Cita-cita koperasi akan menjadi pelaku ekonomi dan menjadi soko guru dalam perekonomian nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat secara bersama-sama. Realitanya setelah 76 tahun kemerdekaan Indonesia belum banyak yang dapat dibanggakan.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Bahasa yang disampaikan buku ini sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. Buku ini dilengkapi dengan indeks dan terminologi yang memudahkan pembacanya untuk menuju subyek tertentu dari buku serta memahami peristilahan dalam bidang ekonomi.

Bionarasi :



Maryanti. NIP.198003252007012001. Perempuan. Program S3 (Doktor) Ilmu Ekonomi Unand.